

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin, Firmansyah, d.k.k., 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.

_____, 2005, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.

_____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Konstitusi Press, Jakarta.

_____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta.

_____, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

_____, 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

_____, 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta.

_____, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly dan Bagir Manan, d.k.k., 2006, *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Cet. ke-2, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2002, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Percetakan Negara RI, Jakarta.

Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Diansyah, Febri, 2009, *KPK Janganlah Dihancurkan* dalam buku *Jangan Bunuh KPK, Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi*, Kompas, Jakarta.

Djafar, Saidi M., 2011, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fachruddin, Irfan, 2005, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.

Fahrojih Ikhwan dan Mokh. Najin, 2008, *Menggugat Peran DPR dan BPK dalam Reformasi Keuangan Negara*, In-Trans Publishing, Jawa Timur.

Hamid, S. A. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Harun, Refli, 2004, *Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Kontitusi Press, Jakarta.

Huda, Ni'matul, 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.

- Husen, La Ode, 2005, *Hubungan Fungsi dan Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Kansil, C.S.T., 1984, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Maheka, Arya, 2006, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1991, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marbun, S. F., 2001, *Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana UNPAD, Bandung.
- Muchsan, 2001, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muttaqien, Raisul, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung.
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketujuh, Liberty, Yogyakarta.

Suny, Ismail, 1978, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta.

Susilo, Basis, 1998, *Teori Kontrak Sosial; Hobbes, Locke, dan Rousseau*, FISIP UNAIR, Surabaya.

Tauda, Gunawan A., 2012, *Komisi Negara Independen, Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta.

Thalhah, M., dan Sobirin Malian, 2011, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.

Van Apeldoorn, L.J., 1968, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Tahun 1978 Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/ antar Lembaga Tinggi Negara.

Ketetapan MPR Tahun 1998 Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 137 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995.

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor KEP-06/P.KPK/02/2004 tentang Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor KEP-07/P.KPK/02/2004 tentang Organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER-08/XII/2008 Tanggal 30 Desember Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Skripsi

Argama, Rizky, 2007, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: tidak diterbitkan.

Asmoro, Yugo, 2009, *Analisis Status Dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta: tidak diterbitkan.

Najiulloh, 2004, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: tidak diterbitkan.

Tauda, Gunawan Abdullah, 2002, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi (Studi Perbandingan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dan Hong Kong Independent Commission Against Corruption)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta: tidak diterbitkan.

Makalah

Asshiddiqie, Jimly, “*Stuktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*”, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

_____, “*Perkembangan Ketatanegaraan Pasca-perubahan UUD 1945 dan Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia*”, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 dan Pembaruan Kurikulum Pendidikan Hukum Indonesia, Jakarta, 7 September 2004.

_____, “*Beberapa Catatan Tentang Lembaga-Lembaga Khusus Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*”, disampaikan pada diskusi Seminar

Nasional Lembaga-Lembaga Non-Struktural diselenggarakan oleh Kantor Menpan Republik Indonesia, Jakarta, 1 Maret 2011.

Soemantri, Sri, , “*Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*”, Makalah disampaikan pada Forum Dialog Nasional Bidang Hukum, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 26-29 Juni 2007.

Jurnal

“Denny Indrayana”, Dikutip dari Mivhael R. Asimov, *Komisi Negara Independen Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan*, Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional. No. 2, 1998.

“Tri Karyanti”, “*Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD*”, dikutip dari Majalah Ilmiah Informatika Vol. 3 No. 1. Januari, 2012.

Internet

Indonesia Corruption Watch,
<http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9491>, diakses pada tanggal 4 Februari 2014.

Katharina, Riris dan Poltak Partogi Nainggolan, “*Pengawasan Peradilan oleh State Auxiliary Institutions*”, <http://anggara.org/2006/07/20/pengawasan-peradilan-oleh-state-auxiliary-institutions/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2014.

Komisi Pemberantasan Korupsi, <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 17 Maret 2014.

Komisi Pemberantasan Korupsi, <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/visi-misi>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2014.

OCK & Associates, <http://ocklaw.com/menuju-kpk-ideal/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2014.

Praduwiratna, Rangga. “*Mencermati Kinerja KPK dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”,
<http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20090610203733>, diakses
pada tanggal 24 Maret 2014.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <http://setkab.go.id/berita-7732-10-lembaga-non-struktural-diusulkan-digabung-atau-dibubarkan.html>, diakses pada
tanggal 18 Maret 2014.

Suara Merdeka, “*Mengawasi Kinerja KPK Jilid II*”,
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0712/17/opi03.html>, diakses pada
tanggal 24 Maret 2014.

Tanuredjo, Budiman, “*Trias Politica di zaman yang Berubah*”,
http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=202&coid=3&caid=3,
diakses pada tanggal 5 Mei 2014.